

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP HUTAN (Studi Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk)

Oleh

Muhamad Hafidz Cahya Pratama

Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Hutan adalah tindak pidana yang dilakukan baik oleh korporasi ataupun perseorangan yang dilakukan dengan cara penebangan ilegal, penggunaan kawasan hutan tidak sesuai izin, memperjual belikan izin usaha pengelolaan hutan tanpa izin, dan lain sebagainya. Pada Putusan No.35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, terdakwa PT. Seni Kayu Indonesia diwakili oleh Yosep Ali Purnama selaku direktur utama, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Memindahtangankan atau memperjualbelikan izin usaha tanpa seizin menteri yang berwenang dan di jatuhi Pidana Denda sebesar 5 Milliar Rupiah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1)bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, serta (2)apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan. Proses yang digunakan dalam pengolahan data dilakuka dengan cara identifikasi, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan dari data yang ada. Data dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan informasi secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa bertanggungjawab secara pidana karena terbukti melanggar Pasal 96 ayat (2) huruf C UU No. 18 Tahun 2013. Terdakwa secara hukum terbukti memenuhi unsur-unsur hukum berupa unsur korporasi dan unsur dengan sengaja memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan menteri, ditambah dengan

Muhamad Hafidz Cahya Pratama

unsur yang memberatkan berupa adanya potensi menimbulkan kerusakan hutan dan unsur yang meringankan seperti tidak menyulitkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi aspek dan tujuan secara yuridis, namun dirasa belum memenuhi unsur sosiologis dan filosofis, hal ini dapat terlihat dari tidak adanya kepastian mengenai surat izin usaha tersebut telah dicabut atau belum serta hukuman pidana yang belum menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, saran dari penelitian ini yaitu diharapkan perlu adanya penguatan terhadap penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Dan dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi, Hakim diharapkan untuk lebih memperhatikan unsur yuridis, sosiologis, dan juga unsur filosofis. Serta mempertimbangkan untuk menambahkan bentuk pertanggungjawaban berupa menanam kembali pohon, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban korporasi yang melakukan kerusakan. Agar putusan yang diberikan dapat memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah lingkungan hidup tersebut sehingga tujuan dari hukum dapat tercapai.

Kata Kunci : Korporasi, Perusakan Hutan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

ABSTRACT

ANALYSIS OF CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ACTIONS OF ENVIRONMENTAL DESTRUCTION OF FORESTS (Study of Decision Number 35/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk)

By

MUHAMAD HAFIDZ CAHYA PRATAMA

The Crime of Forest Environmental Destruction is a crime committed by both corporations and individuals which is carried out by means of illegal logging, use of forest areas not in accordance with permits, selling and buying forest management business permits without permits, and so on. In Decision No.35/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, the defendant PT. Seni Kayu Indonesia represented by Yosep Ali Purnama as the main director, was legally and convincingly proven to have committed the crime of Transferring or selling business permits without the permission of the authorized minister and was sentenced to a fine of 5 billion Rupiah. The problems in this study are (1) how is the criminal responsibility for corporations that commit environmental crimes, and (2) what is the basis for the judge's consideration in making decisions against perpetrators of environmental crimes.

This study uses a normative and empirical legal approach. The primary data used in this study came from interviews, while secondary data was obtained through literature studies. The process used in data processing is carried out by means of identification, classification, and drawing conclusions based on existing data. Data is analyzed qualitatively by systematically describing information in order to answer the problems in this study.

Based on the results of the research and discussion in this study, it was concluded that the defendant is criminally responsible because he was proven to have violated Article 96 paragraph (2) letter C of Law No. 18 of 2013. The defendant was legally proven to have fulfilled the legal elements in the form of corporate elements and elements of intentionally transferring or selling permits issued by authorized officials except with the approval of the minister, plus aggravating elements in the form of the potential to cause forest damage and mitigating elements such as not making it difficult in court. The judge's considerations in passing the verdict have fulfilled the legal aspects and objectives, but it is felt that they have not fulfilled the sociological and philosophical elements, this can be seen from the lack of certainty regarding whether the business license has been

Muhamad Hafidz Cahya Pratama

revoked or not and the criminal sentence has not had a deterrent effect on the perpetrator.

Based on this, the suggestion from this study is that it is hoped that there will be a need to strengthen the enforcement of criminal law against corporations that commit environmental crimes. And in making a decision against a corporation, the Judge is expected to pay more attention to the legal, sociological, and philosophical elements. And consider adding a form of accountability in the form of replanting trees, as a form of corporate accountability for the destruction. So that the decision given can provide a deterrent effect on the perpetrator and provide protection to the community living around the environmental area so that the objectives of the law can be achieved.

Keywords: Corporations, Forest Destruction, Corporate Criminal Liability